



Model Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa

Yuli Setyowati¹

Analius Giawa²

Rema Marina³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Indonesia

Corresponding Author: gracedista72@gmail.com

Article Info

Keyword:

Keyword 1;
Optimization;
Keyword 2;
Female Role;
Keyword 3;
Village Development;

Abstract: Based on BPS data, the Gender Empowerment Index (IDG) in Indonesia in 2019 was 75.24 and in 2020 it showed a value of 75.57, means there is still gender inequality. Gender inequality conditions also occur at the village level, and there are more than 75,000 villages spread across 34 provinces of Indonesia. This study aims to describe the role of women in village development and find models that are relevant to community culture to optimize the role of women in available public spaces. This research was conducted in Dadapayu Semanu Village, Gunung Kidul DIY, using a descriptive qualitative approach. Collecting data is done collaboratively between interview, observation, Focus Group Discussion (FGD), and documentation. Informants in this study were selected purposively, consist of the Head of the Dadapayu Village, the Village Head, the Head of the Family Welfare Program (PKK), and women activists. Data analysis used an interactive analysis model consisting of three main components, namely by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study are: 1) the role of women in village development in Kalurahan Dadapayu is classified as good as evidenced by high enthusiasm and high participation, but has not been supported by a high commitment from the village government and the availability of access for women to optimize roles in village development; 2) the model for optimizing the role of women in village development includes several dimensions, namely: village government commitment, village vision and mission, village policies on women, village head leadership, accessibility for women through village institutions, and women's participation.

Kata Kunci:

Kata Kunci 1;
Optimalisasi
Kata Kunci 2;
Peran Perempuan
Keyword 3;
Pembangunan Desa

Abstrak: Berdasarkan data BPS, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia tahun 2019 sebesar 75,24 dan di tahun 2020 menunjukkan nilai 75,57, hal ini masih menunjukkan adanya ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender juga terjadi di tingkat desa, dan terdapat lebih dari 75.000 desa yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran perempuan dalam pembangunan desa dan menemukan model yang relevan dengan kultur masyarakat untuk mengoptimalisasi peran perempuan di ruang-ruang publik yang tersedia. Penelitian ini dilakukan di Desa Dadapayu Semanu Gunung Kidul DIY, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara kolaboratif antara wawancara, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, terdiri dari Kepala Kalurahan Dadapayu, Perangkat Kalurahan, Ketua Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan para pegiat perempuan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) peran

perempuan dalam pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu tergolong baik dibuktikan dengan tingginya antusiasme dan partisipasi yang tinggi, namun belum didukung dengan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah desa dan tersedianya akses bagi perempuan untuk mengoptimalkan peran dalam pembangunan desa; 2) model optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa meliputi beberapa dimensi yaitu: komitmen pemerintah desa, visi dan misi desa, kebijakan desa tentang perempuan, kepemimpinan kepala desa, aksesibilitas bagi perempuan melalui lembaga-lembaga desa, dan partisipasi perempuan.

Article History: Received 15-Februari-2022, Revised 20-Maret-2022, Accepted: 21-April-2022

PENDAHULUAN

Persoalan peran perempuan dan desa selalu menarik untuk dikaji. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan masyarakat desa berdaulat atas dirinya sendiri dalam mengelola pembangunan dan penyelenggaraan desa sebagai subjek pembangunan desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), desa memiliki peran sangat strategis mendukung pencapaiannya. Untuk itu pembangunan desa diarahkan menjadi pembangunan desa berkelanjutan. Fokus gerakan penyelenggaraan dan pembangunan desa berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat desa. UU Desa menjamin peran seluruh unsur masyarakat termasuk perempuan dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai bagian dari masyarakat, perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pembangunan Desa. Oleh sebab itu, optimalisasi peran perempuan menjadi sangat penting untuk memastikan berjalannya pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu sesuai dengan yang diharapkan.

Desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupannya (Nurcholis, 2011).

Dalam konteks pembangunan, desa tidak lagi dipandang hanya sebagai objek, namun sebagai subjek pembangunan. Evaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender menggunakan beberapa indikator, diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi (kemenpppa.go.id). Berdasarkan data BPS tahun 2020 (<https://www.bps.go.id/indicator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg.html>), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia tahun 2018 menunjukkan nilai 72,10, tahun 2019 sebesar 75,24, dan di tahun 2020 menunjukkan nilai 75,57. Dalam kurun waktu tiga tahun, nilai IDG menunjukkan peningkatan, namun hal ini masih menunjukkan adanya ketimpangan gender.

Kondisi ketimpangan gender juga terjadi di tingkat desa, sementara di Indonesia terdapat lebih dari 75.000 desa yang tersebar di 34 provinsi. IPG Kabupaten Gunung Kidul dalam kurun waktu tiga tahun menunjukkan angka sebagai berikut: tahun 2018 sebesar 84,59, tahun 2019

sebesar 84,62, dan tahun 2020 sebesar 84,73. Jika dibandingkan dengan IPG kabupaten/kota lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, IPG Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan angka terendah (<https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/26/88/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-menurut-kabupaten-kota.html>). Oleh sebab itu saat ini persoalan pembangunan yang berpihak pada perempuan menjadi penting dan menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji.

Tantangan pembangunan manusia di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan struktural dan kultural (Rosyidah & Nurwati, 2019). Secara struktural, keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem, perspektif, dan analisis gender para pengambil kebijakan dan pelaksana program. Secara kultural, konstruksi gender yang masih merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan masih kuat mengakar. Budaya patriarki masih terlihat dalam praktik kehidupan masyarakat yang berdampak pada hasil-hasil pembangunan. Stereotip yang terus dikonstruksi berakibat pada posisi perempuan yang secara budaya diposisikan lebih rendah sehingga pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik perempuan. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia Indonesia. Tak dapat dipungkiri fenomena ini tergambar dalam potret pembangunan desa di wilayah Indonesia.

Kalurahan Dadapayu merupakan salah satu desa di wilayah pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Semua desa yang berada di wilayah Provinsi DIY disebut dengan istilah “kalurahan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Dadapayu memiliki ciri-ciri geografis yaitu berada di wilayah pegunungan, berbatu dan curah hujan yang sangat terbatas. Mata pencaharian masyarakat setempat dominan sebagai petani ladang yang banyak melibatkan perempuan sebagai penggarapnya. Jika dilihat dari komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, data menunjukkan tidak jauh berbeda. Demikian pula dengan data berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk laki-laki dan perempuan yang berpendidikan di bawah tingkat SLTP pun tidak menunjukkan perbedaan yang berarti, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Penduduk laki-laki dan Perempuan berdasarkan Pendidikan dibawah SLTP

Kategori	Laki-laki	Perempuan	Total
Jenis kelamin	3931	3959	7890
Pendidikan di bawah SLTP	2644	2855	5499

Sumber: Statistik kependudukan DI Yogyakarta Semester 1 tahun 2021

Dari data tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah yang mencolok antara laki-laki dan perempuan di Kalurahan Dadapayu, namun terdapat 70% penduduk memiliki tingkat pendidikan di bawah SLTP dengan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Hal ini dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

Keterkaitan lainnya yaitu pada tataran ruang publik, keterlibatan perempuan masih sangat terbatas. Data keterlibatan perempuan pada anggota BPD masih belum mencapai 30%. Dari 11 anggota BPD Kalurahan Dadapayu hanya terdapat satu orang perempuan dan sisanya laki-laki. Lembaga-lembaga perempuan seperti PKK, Kader Keluarga Berencana, Kelompok Pengajian Ibu-ibu, dan kelompok-kelompok perempuan lainnya belum dapat menjadi akses atau ruang publik yang memberdayakan dan mengoptimalkan peran perempuan Kalurahan

Dadapayu. Semangat dan antusiasme kaum perempuan untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembangunan desa tergolong baik, namun hal ini masih didominasi oleh kelompok tertentu serta belum didukung sepenuhnya melalui komitmen dan kepemimpinan pemerintah desa.

Situasi di Desa Dadapayu dapat direfleksikan dengan Peraturan Materi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Hal ini diperkuat oleh artikel Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan yang dirilis 15 November 2019 (<https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>) bahwa perempuan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di desa-desa, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Hal ini sebenarnya telah sinkron dengan kondisi yang ditunjukkan melalui data BPS tahun 2018 bahwa tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih tinggi dari laki-laki. Keadaan ini menjadi tidak sinkron dengan melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA) perempuan justru sebaliknya lebih rendah dibanding TPAK laki-laki. TPAK masih didominasi laki-laki dengan partisipasi sebesar 83,18%. Sementara itu, TPAK perempuan hanya sebesar 55,5%. Demikian pula dengan Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 yang dirilis oleh BPS, proporsi laki-laki dalam sektor kerja formal hampir dua kali lipat dibanding perempuan. Mirisnya, dalam 10 tahun terakhir, tren proporsi tersebut cenderung stagnan dan bahkan perempuan bekerja masih sangat rentan untuk terpapar *economic shocks*. Hal ini tidak terlepas dari pola dan sudut pandang terhadap posisi perempuan di tengah-tengah masyarakat desa.

Pada dasarnya peran perempuan sangat diperlukan demi melestarikan kebudayaan dalam bermasyarakat untuk diteruskan pada generasi selanjutnya. Prasekti & Rohmah (2017) menyebutkan bahwa perempuan tidak lagi dianggap lemah, justru perempuanlah yang memiliki peran sangat besar dalam keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu perempuan tidak hanya perlu ditingkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilannya, tetapi perempuan harus mempunyai keberanian dan kebesaran jiwa dalam mengoptimalkan partisipasinya dalam pembangunan. Demi keberhasilan pembangunan desa diperlukan peran serta dari perempuan secara optimal. Dalam hal ini dukungan, dorongan moril, dan pengertian dari kaum laki-laki khususnya suami, sangat diperlukan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peran perempuan dalam pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu dan menemukan model yang relevan dengan kultur masyarakat untuk mengoptimalkan peran perempuan di ruang-ruang publik yang tersedia. Situasi pandemi covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan desa, dan secara otomatis keterlibatan warga perempuan pun menjadi terdampak.

Urgensi dari kajian ini yaitu diperolehnya manfaat teoretik dan praktis untuk memperkaya diskursus tentang peran, partisipasi, dan akses perempuan dalam pembangunan desa, dan secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk merumuskan kebijakan pembangunan desa yang berpihak pada perempuan secara holistik dan berkeadilan. Dengan demikian akan dapat dilihat upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif menurut Bogdan & Guba dalam Suharsaputra (2012) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sugiyono & Lestari (2021) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kalurahan Dadapayu, Perangkat Kalurahan, Ketua PKK, Ketua kelompok komunitas perempuan, tokoh masyarakat, pegiat perempuan, ibu-ibu rumah tangga. Data penelitian dikumpulkan dengan empat cara, yaitu wawancara mendalam, observasi, *Fokus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki keterkaitan dengan peran perempuan di Kalurahan Dadapayu. Observasi dilakukan dengan mengamati situasi dan kondisi berkaitan dengan aktivitas perempuan Kalurahan Dadapayu dalam pembangunan desa. FGD dilakukan bersama perwakilan kaum perempuan dari berbagai kelompok, dan dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian, serta aktivitas-aktivitas selama kegiatan penelitian dilakukan di kalurahan Dadapayu.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sutopo, 2006) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi. Aktivitas atas tiga komponen tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Data yang diperoleh dipastikan validitasnya dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan desa merupakan pembangunan yang terkait dengan pemberdayaan (*empowerment*), yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga desa secara simultan. Dengan tujuan itu pembangunan desa dirancang untuk menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan daerah dan pembangunan nasional, selain itu pembangunan desa juga diharapkan dapat menjadi pembangunan yang berwawasan masa depan dan berkelanjutan. Dengan *empowerment* masyarakat mempunyai kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuan dan perannya dalam merencanakan dan melaksanakan sendiri perubahan-perubahan yang mereka kehendaki untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik (Bryant, dan White, dalam Manembu, 2017). Masyarakat yang berkesempatan mengembangkan kemampuan dan perannya termasuk di dalamnya adalah kaum perempuan di desa.

Optimalisasi peran perempuan Kalurahan Dadapayu dalam pembangunan desa terlihat mulai dari adanya komitmen yang kuat Pemerintah Kalurahan Dadapayu melalui pencapaian visi dan misi, kebijakan desa melalui penyediaan akses berupa lembaga-lembaga tingkat desa dan dusun yang memungkinkan para perempuan beraktivitas dan berperan lebih dalam pembangunan desa. Optimalisasi peran perempuan yang telah mendapat dukungan dari pemerintah kalurahan ini disambut baik oleh para perempuan Kalurahan Dadapayu dengan melakukan upaya-upaya nyata berupa kemauan yang kuat para perempuan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat desa dengan membagi waktu secara baik antara tugas sebagai ibu

rumah tangga, kegiatan bertani, dan kegiatan-kegiatan di desa. Hal ini sangat dipengaruhi oleh motif yang kuat untuk ikut mamajukan desa.

Peran perempuan ini sangat berkaitan dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau kedudukannya baik di keluarga maupun di masyarakat. Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*), artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. John Scot (dalam Ahdiah, 2013) mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar *siapa* mereka di depan orang lain dan *bagaimana* mereka harus bertindak terhadap orang lain.

Peran dan status merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Setiap orang dapat memiliki beberapa peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempat dalam pergaulan kemasyarakatan. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu: 1) peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; 2) peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; dan 3) peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Narwoko, 2011).

Pada dasarnya perempuan dapat berperan dalam berbagai bidang. Susilowati dkk (2020) dalam tulisannya memaparkan tentang peran perempuan dalam politik dan kebijakan publik. Kekuatan perempuan di bidang politik, terutama dalam mempengaruhi kebijakan publik merupakan hal penting dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal tersebut ditunjukkan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka pasca Reformasi Gereja di Prancis melalui gerakan Feminisme. Feminisme yang awalnya bertujuan untuk memperoleh kesetaraan dengan laki-laki sebagai subyek aktif salah satunya di bidang pendidikan, kemudian menjadi gerakan yang menuntut kesetaraan di berbagai bidang. Di Indonesia, kekuatan perempuan di bidang politik terlihat ketika masa-masa kampanye pasca Pilpres 2019 melalui gerakan yang mereka sebut dengan istilah “emak-emak”. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap peran perempuan di legislatif semakin terlihat dengan disahkannya UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu pasal 15 dan 55 mengenai kuota 30% wakil partai dari perempuan. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa peran perempuan dalam politik cukup signifikan baik secara praktis maupun non praktis. Di masa pandemi seperti saat ini, perempuan mampu berperan secara signifikan, baik melalui pola *top down* sebagai anggota pemerintahan, maupun melalui pola *bottom up* sebagai masyarakat sipil yang bisa menjadi kekuatan dalam menekan kebijakan publik.

Dalam konteks pembangunan desa, Darmi (2016) mengkaji tentang optimalisasi peran perempuan berbasis modal sosial. Peranan perempuan dalam merencanakan pelaksanaan program-program desa yang disebut dengan APBDesa, dapat menampung aspirasi-aspirasi

mereka melalui kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai, norma dan budaya. Melalui optimalisasi peranan perempuan dapat melibatkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan keterbukaan pengelolaan dana desa yang kesemuanya dapat digunakan sebagai kapital sosial desa menuju pemerintahan yang bersih dalam pengelolaan Dana Desa. Melalui kajian ini Darmi menemukan rendahnya kesetaraan gender disebabkan beberapa faktor diantaranya karena faktor sosial, budaya dan tradisi yang dianut oleh warga desa serta kebijakan, regulasi dan program kerja belum konsen terhadap gender. Pemahaman bahwa kaum perempuan hanya bisa berpartisipasi dalam urusan rumah tangga, sedangkan kaum laki-laki lebih leluasa berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan berimplikasi pada kurangnya kiprah perempuan baik keterlibatan perempuan untuk jabatan di pemerintahan desa maupun keterlibatan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan Desa. Agar optimalisasi peran perempuan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dicapai, perlu langkah kongkret dan komitmen bersama semua *stakeholder* dimulai dengan memperkuat kelembagaan perempuan di desa, baik melalui PKK, posyandu, dasawisma dan lain-lain. Di samping itu perlu membuat jaringan-jaringan individu dan kelompok, jaringan tersebut bisa informal maupun formal, jaringan ini sebagai modal sosial akan membantu setiap permasalahan yang dihadapi perempuan.

Kajian ini menunjukkan hasil bahwa komitmen pemerintah desa dalam membuka kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk aktif terlibat dalam pembangunan desa menjadi dimensi utama bagi optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan kepala kalurahan yang dapat dilihat dari visi dan misi Pemerintah Kalurahan Dadapayu dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan desa. Kebijakan desa terkait dengan ketersediaan lembaga desa berbasis perempuan yang dapat dijadikan akses dan menjadi wadah bagi kaum perempuan untuk mengoptimalkan perannya.

Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan desa bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. Namun peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang pembangunan desa merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Secara kelembagaan, komitmen pemerintah Kalurahan Dadapayu tercermin dalam visi dan misi Kepala Kalurahan. Adapun visi Kalurahan Dadapayu adalah “*Seko nDeso neng Malioboro, bali nDeso nyejahterakke uripe warga mulyo lan sentoso adil, makmur berdasar Pancasila*” (dari desa ke Malioboro/kota, kembali ke desa untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat menuju sejahtera adil makmur berdasarkan Pancasila). Visi ini dijabarkan ke dalam sejumlah misi sebagai berikut: Pertama, melanjutkan program yang dijalankan pemerintah/kepala desa Dadapayu dengan: 1) melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja; 2) meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di desa; 3) meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan profesional. Kedua, memberdayakan semua yang ada pada masyarakat Arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain: 1) mengembangkan pendidikan anak usia dini; 2) meningkatkan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak; 3) meningkatkan ketersediaan rumah serta sarana dan prasarana dasar pemukiman; 4) meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Jika dilihat dari visi misi Kalurahan Dadapayu tidak ada misi yang menyebutkan komitmennya pada optimalisasi peran perempuan.

Komitmen pemerintah desa untuk melibatkan kaum perempuan dalam berbagai program pembangunan merupakan kunci bagi optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa. Pada dasarnya semua program pembangunan di Kalurahan Dadapayu telah melibatkan perempuan tetapi masih didominasi oleh kelompok tertentu, terutama adalah istri para perangkat desa. Komitmen pemerintah desa ini dapat dilihat dari sikap apresiatif terhadap keterlibatan perempuan dalam forum-forum desa. Usulan-usulan dari kaum perempuan mendapatkan tanggapan yang baik. Pemerintah Desa memandang bahwa pembangunan itu harus dapat dimanfaatkan oleh semua warga baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun demikian, apresiasi pemerintah kalurahan dan warganya terhadap keterlibatan perempuan dalam program pembangunan sudah diupayakan, hal ini dapat dilihat dari adanya 2 (dua) orang Dukuh perempuan di Kalurahan Dadapayu. Proses seleksi perangkat desa berlangsung sangat demokratis dan tidak diskriminatif. Warga perempuan yang mencalonkan diri dan memenuhi persyaratan akan lolos seleksi sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan.

Kebijakan Kalurahan Dadapayu terhadap lembaga-lembaga desa berbasis perempuan sebagai wadah aspirasi perempuan masih belum secara optimal dilaksanakan dan juga belum menjadi sebuah pedoman terhadap pembangunan di kalurahan. Beberapa kegiatan kelompok ibu-ibu di Kalurahan Dadapayu masih berjalan hanya karena faktor keterikatan antara para pelaku kegiatan itu sendiri akan tetapi secara formal Kalurahan belum membuat sebuah aturan baku yang menjadi pedoman dan arah kerja pada setiap kegiatan kelompok ibu-ibu di Kalurahan Dadapayu.

Visi-misi yang menjadi manifestasi dari komitmen pemerintah kalurahan selain dapat dilihat dari produk-produk kebijakan kalurahan, juga dapat dilihat dari pola kepemimpinan kepala kalurahan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Lurah Dadapayu menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya di Kalurahan Dadapayu, keberadaan perempuan dalam kegiatan kalurahan masih penting. Perempuan saat ini memiliki posisi dan derajat yang sama dengan laki-laki dalam berbagai hal. Dengan demikian perempuan juga memiliki peran yang besar dan sama dalam pembangunan di suatu wilayah seperti di Kalurahan Dadapayu ini. Namun dengan adanya ruang pada perempuan juga tidak melupakan kodrat sebagai ibu dalam keluarga.

Dalam kepemimpinan di Kalurahan Dadapayu belum terlihat memiliki arah dan desain yang jelas tentang optimalisasi peran perempuan dalam membuka ruang, kesempatan dan pemberdayaan secara berkesinambungan bagi para perempuan. Ada banyak sumber daya yang dimiliki oleh perempuan akan tetapi belum mampu dioptimalkan dan digunakan sebagai kekuatan dan sumber daya dalam pembangunan di Kalurahan Dadapayu Semanu. Hal ini dapat dilihat bahwa aksesibilitas perempuan Kalurahan Dadapayu dalam lembaga-lembaga desa belum optimal, sehingga partisipasinya pun belum secara penuh dapat dilihat dalam keseluruhan aktivitas pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Lembaga desa berbasis perempuan yang sudah resmi hanya PKK, selanjutnya lembaga-lembaga lain masih berjalan hanya sebatas interaksi dan komunikasi antar peronil tetapi belum terlembagakan secara formal di Kalurahan Dadapayu yang tertuang dalam peraturan desa. Personil yang selama ini terlibat dalam forum-forum perempuan yang disebut kader adalah para istri dukuh dan ketua RW dan RT. Ini menggambarkan bahwa perempuan yang terlibat dalam kegiatan di pembangunan di Kalurahan Dadapayu masih sebatas pada kelompok tertentu yang memiliki keterkaitan dengan struktural pemerintahan kalurahan.

Optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa sangat tergantung dari tingkat partisipasi dari kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam forum-forum dan lembaga-lembaga desa tersebut. Partisipasi ini dimulai dari adanya kemauan yang kuat untuk berkontribusi

secara aktif dalam pembangunan desa. Kemauan ini didukung oleh adanya kemampuan dan pengalaman sehingga keterlibatan para perempuan di Kalurahan Dadapayu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keterlibatan perempuan salah satunya dapat dilihat juga pada struktur Pemerintah Kalurahan Dadapayu, dari 33 orang perangkat, lima diantaranya adalah perempuan. Kelima orang perangkat perempuan ini juga melalui seleksi yang sangat ketat bersaing dengan kaum laki-laki. Dalam hal menjalankan tugas di pemerintahan desa, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua bekerja sesuai dengan tupoksinya, bahkan jika dilihat dari sisi waktu bekerja, tidak ada perbedaan karena yang diutamakan adalah kinerja dari para perangkat desa tersebut.

Pemerintah kalurahan Dadapayu telah berupaya mengapresiasi kontribusi para perempuan dalam pembangunan desa. Kontribusi tersebut dimulai dari keterlibatan yang sangat baik perempuan dalam forum-forum di desa. Dengan demikian pemerintah desa dapat dengan mudah mengakomodasi kebutuhan perempuan. Aspirasi para perempuan diakomodasi dalam pembuatan RKP dan APBDes, dilihat dari tingkat urgensi dari kebutuhan tersebut. Apresiasi ini sangat didukung oleh adanya kekompakan para perempuan dalam forum-forum desa. Kekompakan tersebut juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi perempuan di Kalurahan Dadapayu yang tergolong tinggi. Sebelum terjadi pandemi covid-19, kehadiran perempuan di forum-forum desa dapat mencapai sekitar 100 orang dari total 207 orang kader yang ada di Kalurahan Dadapayu, dan rata-rata kader punya andil yang cukup besar dalam proses pembangunan desa. Namun demikian, dari keseluruhan perempuan yang aktif tersebut masih didominasi oleh kalangan elit desa, yaitu para istri Dukuh dan perempuan yang ditokohkan di wilayah tersebut.

Memotivasi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah. Latar belakang pendidikan kaum perempuan yang rata-rata berpendidikan relatif rendah, membuat mereka tidak percaya diri untuk menyuarakan pendapatnya. Namun dengan adanya akses dan kesempatan yang diberikan, termasuk dalam kegiatan musyawarah yang melibatkan perempuan, lambat laun mereka mulai terbiasa menyampaikan aspirasinya. Cara yang paling efektif dalam memotivasi perempuan adalah dengan melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok level RT atau dusun, karena kelompok tersebut memiliki kekuatan, kemudian dari kelompok tersebut dibangun jejaring karena informasi biasanya didapat dari relasi jejaring. 6Relasi jejaring yang paling efektif adalah melalui kelompok PKK dan pengajian.

Terkait dengan pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu, sebenarnya tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan warga masyarakat ada yang pro dan kontra jika melihat ada perempuan yang maju sebagai pemimpin. Hal tersebut bermula dari pandangan sebagian warga masyarakat bahwa perempuan itu tempatnya di rumah, tidak pantas menjadi “imam” dan pasti tidak bisa “mengimami” seluruh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut dapat muncul karena faktor rendahnya tingkat pendidikan dan wawasan sumber daya manusianya, walaupun di Kalurahan Dadapayu tidak ada perbedaan kesempatan menempuh pendidikan bagi kaum laki-laki dan perempuan, semua punya kesempatan yang sama. Banyak perempuan di Kalurahan dadapayu yang tidak berpendidikan tinggi namun dapat terlibat aktif dan berkiprah secara konstruktif dalam pembangunan desa karena adanya faktor pengalaman di dunia kerja yang dapat dijadikan modal untuk aktif di masyarakat. Partisipasi ini dimulai dari adanya kemauan yang kuat untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan desa. Kemauan ini didukung oleh adanya kemampuan dan pengalaman sehingga keterlibatan para perempuan di Kalurahan Dadapayu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun hasilnya belum dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.

Faktor pendukung utama keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu adalah dukungan suami. Secara kultural, pandangan masyarakat tentang kesetaraan gender belum sepenuhnya dipahami bahwa kaum laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif di luar rumah. Namun, fenomena yang terjadi di Kalurahan Dadapayu, sudah terjadi pergeseran pandangan, sebagian warga masyarakat memandang bahwa kaum perempuan pun layak untuk maju dan memimpin. Faktor pendukung lainnya adalah adanya kemauan untuk maju dan belajar yang tinggi. Kader perempuan Kalurahan Dadapayu mayoritas memiliki kemauan yang kuat untuk maju dan mau belajar untuk menimba pengalaman.

Di samping adanya faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu, yaitu (1) rendahnya pendidikan politik masyarakat. Banyak perempuan Dadapayu sebenarnya banyak yang bisa tampil sebagai pemimpin di desa (contohnya sebagai Lurah) tapi sayangnya pendidikan politik masyarakat masih sangat kurang. Orang yang tidak punya dukungan finansial yang cukup itu susah untuk jadi; (2) Keterbatasan waktu karena harus berbagi dengan tugas domestik dan mengurus lahan pertanian.

Jika dilihat secara umum bahwa pemerintah Kalurahan Dadapayu telah memberi perhatian pada kelompok-kelompok perempuan akan tetapi sektor-sektor yang menjadi fokus pemerintah kalurahan lebih banyak pada sektor yang bersifat aktifitas rutin yang sering dilakukan oleh para perempuan. Sektor politik merupakan satu sektor yang belum terwadahi dan belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kalurahan Dadapayu. Penguatan kapasitas politik perempuan dalam menyampaikan aspirasi, dan mengakses ruang publik yang ada di Kalurahan Dadapayu masih rendah. Aktifitas pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan pola pikir dan penguatan kapasitas dari kelompok perempuan yang ada di Kalurahan Dadapayu.

Jika menilik tentang peran perempuan, semestinya dilihat bahwa kekuatan perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata. Perempuan banyak berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perempuan menjadi sebuah kekuatan alternatif ketika sosial politik di masyarakat dipandang mengalami fase kebuntuan. Peran perempuan tidak bisa dianggap remeh, karena peran sentralnya dalam keluarga, dimana keluarga merupakan pondasi dasar sebuah bangsa dan negara. Hal tersebut ditegaskan oleh Syarifudin (2017), bahwa perempuan memegang peran strategis terhadap baik buruknya sebuah bangsa melalui perannya sebagai ibu, istri, maupun anak dalam keluarga yang mampu memberikan dampak terhadap masyarakat secara makro.

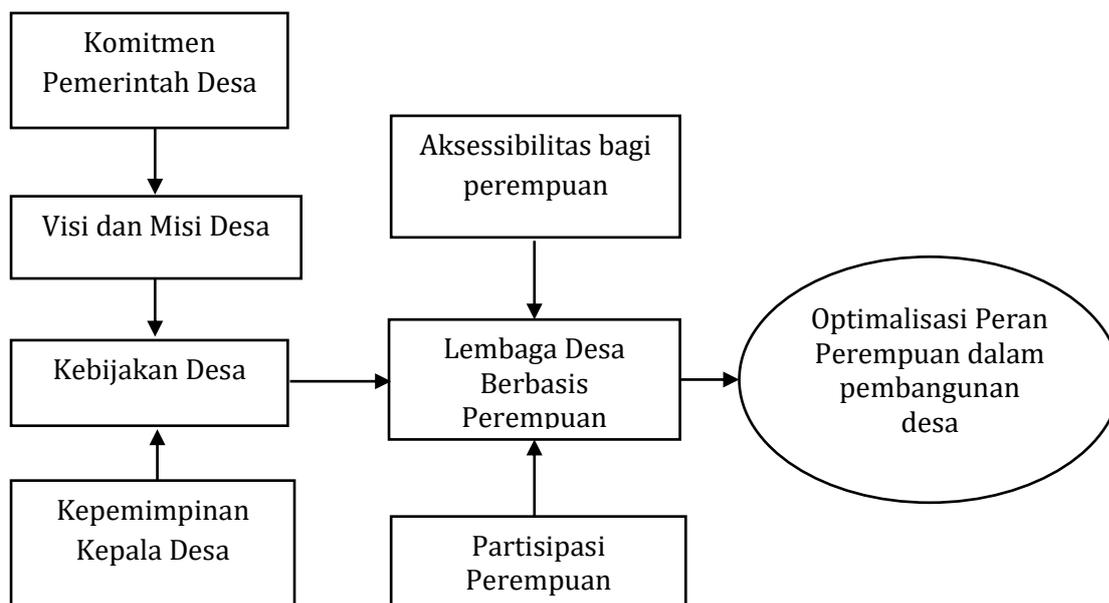
Perempuan baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa.

Optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa pada prinsipnya berbicara tentang kesetaraan dan kemitraan yang harus dibangun melalui komunikasi dialogis. Komunikasi dialogis merupakan iklim komunikasi terbuka dan kondusif sehingga memungkinkan terjadinya dialog dalam proses pembangunan desa. Dalam hal ini tidak ada dominasi laki-laki terhadap perempuan. Jika hal ini dapat dicapai maka akan terjadi pembagian kewenangan (*sharing power*) dan kesetaraan kewenangan (*equal-powership*) dalam

pembangunan desa karena berbagai pihak berusaha menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari dominasi gender. Demikian pula dalam hal kesetaraan tanggung jawab (*equal responsibility*), semua pihak baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses pembangunan desa sehingga semua dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan langkah-langkah pembangunan desa secara jelas. Di sinilah terjadi pelibatan aktif dan kerjasama perempuan dalam pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi yang dimiliki setiap pihak, sehingga terjadi proses belajar bersama dan saling memberdayakan satu sama lain.

Demikianlah terdapat beberapa dimensi dalam model optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa, dimulai dari adanya komitmen pemerintah desa yang dijabarkan ke dalam visi dan misi desa dan kebijakan-kebijakan desa berkaitan dengan dibentuknya lembaga-lembaga desa berbasis perempuan. Faktor penentu dalam proses ini adalah kepemimpinan kepala desa karena kepemimpinan inilah yang akan menggambarkan adanya kemungkinan aksesibilitas bagi perempuan sebagai ruang publik perempuan untuk saling belajar dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses pembangunan. Aksesibilitas bagi perempuan dapat dilihat dari terbukanya lembaga-lembaga desa bagi partisipasi perempuan, sehingga mereka dapat terlibat dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Untuk menggambarkan keterkaitan antar dimensi penelitian, maka model optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa sebagai berikut,

Gambar 1. Model Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa



KESIMPULAN

Optimalisasi peran perempuan Kalurahan Dadapayu dalam pembangunan desa terlihat mulai dari adanya komitmen yang kuat Pemerintah Kalurahan Dadapayu melalui pencapaian visi dan misi, kebijakan desa melalui penyediaan akses berupa lembaga-lembaga tingkat desa dan dusun yang memungkinkan para perempuan beraktivitas dan berperan lebih dalam pembangunan desa. Optimalisasi peran perempuan yang telah mendapat dukungan dari pemerintah kalurahan ini disambut baik oleh para perempuan Kalurahan Dadapayu dengan melakukan upaya-upaya nyata berupa kemauan yang kuat para perempuan dalam mengikuti

kegiatan-kegiatan di tingkat desa dengan membagi waktu secara baik antara tugas sebagai ibu rumah tangga, kegiatan bertani, dan kegiatan-kegiatan di desa. Hal ini sangat dipengaruhi oleh motif yang kuat untuk ikut memajukan desa.

Komitmen pemerintah desa dalam membuka kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk aktif terlibat dalam pembangunan desa menjadi dimensi utama bagi optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa Dadapayu. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan kepala desa yang dapat dilihat dari visi dan misi dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan desa. Kebijakan desa terkait dengan ketersediaan lembaga desa berbasis perempuan yang dapat dijadikan akses dan menjadi ruang publik bagi kaum perempuan untuk mengoptimalkan perannya.

Optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa sangat tergantung dari tingkat partisipasi dari kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam forum-forum dan lembaga-lembaga desa tersebut. Partisipasi ini dimulai dari adanya kemauan yang kuat untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan desa. Kemauan ini didukung oleh adanya kemampuan dan pengalaman sehingga keterlibatan para perempuan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiah, Indah. (2013). Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat. *Jurnal Academica Fisip Untad*. Vol. 05(3), 1085-1092.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Indonesia 2018* (Statistical Yearbook of Indonesia 2018), Jakarta: CV. Dharma Putra.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pemberdayaan Gender. <https://www.bps.go.id/indicator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul. (2021). Indeks Pembangunan Gender. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/26/88/1/indeks-pembangunan-gender-igp-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Darmi, Titi. (2016). Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (Study Pada Pengelolaan Dana Desa). *JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 18 (1), 21-27.
- Kemenko PMK. (2019). *Perempuan dan Anak. Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan*. Artikel. Jakarta. <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. (<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/50a46-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2020.pdf>).
- Manembu, Angelia E. (2017). Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 6(1), 21-28.
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019. Jakarta: Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/c73cb-permen-no-8-thn-2019-ttg-renstra-kpppa.pdf>

- Narwoko, Dwi J dan Bagong Suyanto. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*: Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Prasekti, Y. ., & Rohmah, I. S. . (2017). Peran Wanita Tani dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita.5 Vol Oktober 2017*, 1-16.
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). Statistik kependudukan DI Yogyakarta Semester 1 2021. <https://kependudukan.jogjapro.go.id/statistik>
- Rosyidah, Feryna Nur & Nunung Nurwati. (2019). Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram. *Share: Social Work Jurnal, Vol 9 (1)*, 10-19.
- Susilowati, Ida, Fadhlun Nur Hakiem. (2020). Optimalisasi Peran Perempuan Sebagai Strategi Alternatif Kebijakan Publik Dalam Menekan Penyebaran Pandemi Covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7(8)*, 723-736.
- Sugiyono & Puji Lestari (2021). *Metode Penelitian Komunikasi Bandung*: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. (2012). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutopo, HB. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Edisi Kedua. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Syarifudin, Achmad. (2017). Peran Strategis Kaum Perempuan Dalam Mewujudkan Masyarakat Religi, dalam *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol 12(01)*, 21-32.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pemilu
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta